

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN MEUNASAH DAN DAYAH DI ACEH

Mujianto Solichin

mujiantosolicin@gmail.com

Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang Indonesia

Abstrak: Meunasah dan Dayah dalam masa perjalanannya tumbuh seiring perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Aceh yang memiliki peran strategis dalam pembentukan kebudayaan Islam di wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Ini membuktikan bahwa kerajaan-kerajaan Melayu baik di Malaka (Malaysia) maupun di Aceh (Nangroe Aceh Darussalam) memiliki jaringan arkeologi sejarah kebudayaan dan peradaban yang terbentuk berdasarkan motivasi agama dan menjadikan tradisi Melayu sebagai identitas pemersatu mereka. Kehadiran lembaga-lembaga klasik Islam tersebut di atas terus mengalami perluasan secara fungsional, pergeseran sistem karena tuntutan perkembangan zaman, pun juga tuntutan sosial kehidupan masyarakat yang saat ini tidak lagi membutuhkan pemecahan problematika kehidupan melalui ilmu-ilmu agama semata, namun juga integrasi antara agama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Memodernisasikan Meunasah dan Dayah sebagai upaya menyelamatkan institusi Islam tua ini agar tidak menjadi “cagar budaya”, tentu bisa belajar dari pengalaman model-model modernisasi madrasah berdasarkan pengalaman Mesir (Masjid-Madrasah-Universitas al-Azhar), Turki (Maktab-Sekolah Remaja-Sekolah perempuan-Sekolah Imam-Khatib), dan Saudi Arabia (Madrasah-Sekolah Hasyimiyah).

Kata kunci: Meunasah, Dayah, Aceh, Melayu.

Abstract: Abstract: *Meunasah* and *Dayah* in their development along with Islamic kingdoms in Aceh have a strategic role in the formation of Islamic culture in their own territories. This proves that the Malay kingdoms either in Malacca (Malaysia) as well as in Aceh (NAD) had a network of archaeological history of culture and civilization formed based on religious motivation and made the Malay tradition as their unifying identity. The existence of the classical Islamic institutions mentioned above continue to functionally expand and the system shifted because of the demands of the current time. It was also because of the social demands of the society that is no longer in need of solving the problems of life through a mere religious science, but also the integration of religion, science and Technology. To

modernize Meunasah and Dayah in an effort to save this old Islamic institutions from becoming "cultural heritage", could certainly be learned from the experience of modernization models of madrasa in Egypt (Mosque-Madrasa-al Azhar University), Turkey (Maktab- Teenagers Schools-Girls Schools-Imam Schools-Khatib), and Saudi Arabia (Madrasah-Hashimiyah schools).

Keywords: Meunasah, Dayah, Aceh, Malay.

Pendahuluan

Nanggroe Aceh Darussalam dikenal sebagai “Verandah of Mecca (Serambi Mekkah)”. Pemberian nama ini secara historis berkaitan erat dengan kualitas ulama yang dimiliki, pendidikan Islam dan masyarakat Aceh yang agamis.¹ Kehadiran Kerajaan Islam Samudra Pasai sebagai pusat pemerintahan Aceh di masa lalu telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam upaya membentuk peradaban dan kebudayaan masyarakat Muslim bergenetis Melayu melalui transformasi budaya dan pemikiran Islam.² Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan Islam dan penyebarannya, tidak hanya itu namun juga menjadi sentral “tamadun” yang pertama di Kepulauan Melayu.³ Selain Kerajaan Samudra Pasai Aceh yang turut andil dalam pembentukan sejarah sosial masyarakat Melayu juga terdapat Kesultanan Melayu Malaka yang termasyhur dalam pengembangan sistem administrasi kerajaan, institusi pendidikan, institusi sosial dalam ekonomi, pengembangan politik, undang-undang, norma dan etos kerja dalam membangun sebuah peradaban berciri khas Melayu.⁴ Satu hal yang menarik di Kesultanan Melayu Malaka misalnya, Institusi Pulo Upih (Pulau Upih) dikatakan menerima pelajar dari Jawa antaranya Sunan Bonang dan Sunan Giri, tokoh kunci “Wali Songo” yang

¹ Kamaruzzaman Bustamam dan Ahmad Patrick Jory, *Islamic Studies and Islamic Education in Contemporary Southeast Asia* (Kuala Lumpur: Yayasan Ilmuwan, 2011), xv.

² Mashitah Sulaiman, “Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Melayu Malaysia: Suatu Kajian Eksploratori” *dalam Proceeding of the International Conference on Social Science Research*, ICSSR 2013 (e-ISBN 978-967-11768-1-8). 4-5 June 2013, Penang, Malaysia. Organized by WorldConferences.net, 778 Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, Malaysia, 779.

³ Ibid.,

⁴ Ibid., 789-781.

terkenal. Mereka memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan ajaran Islam di Tanah Jawa sekembalinya dari institusi Pulau Upih di Malaka.⁵

Sepanjang sejarah pemerintahan kerajaan Islam di tanah Melayu telah mewariskan berbagai macam kekayaan kebudayaan dan peradaban, salah satunya adalah produk kekayaan intelektual di bidang pendidikan berupa berdirinya pusat-pusat pendidikan Islam yaitu Meunasah, Dayah dan rangkang. Berkaitan dengan pusat pendidikan Islam di Aceh, Abdul Wahid mengungkapkan bahwa nuansa pendidikan di Aceh memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang dimiliki oleh daerah lain di Indonesia. Setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang membedakan konsep pendidikan di Aceh. Pertama, memiliki landasan syari'at Islam, karena Aceh telah menetapkan pemberlakuan syari'at Islam. Kedua, landasan ke-Aceh-an, karena Aceh memiliki hak yang lebih khusus dalam pelaksanaan pendidikan. Kedua landasan ini merupakan implementasi dari disahkannya pemberlakuan Aceh sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus, yang dibungkus dalam Undang-undang Aceh.⁶ Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pergulatan sejarah masyarakat Aceh dalam memperjuangkan hak-hak sosial kemanusiaannya. Kesempatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Aceh, sebelum kesempatan itu sendiri hilang atau tidak lagi dimiliki termasuk otonomi pengelolaan dan pengembangan institusi Meunasah, Dayah dan Rangkang yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman.

“Meunasah” adalah lembaga pendidikan Islam tingkat dasar (setingkat MI/SD), pertama kali tumbuh dan berkembang di Aceh. Meunasah sebenarnya berasal dari kata Madrasah yang dalam dialek masyarakat Aceh berubah menjadi Meunasah. Adapun “Dayah” merupakan institusi lanjutan dari Meunasah atau disebut juga lembaga pendidikan Islam tingkat menengah (setingkat SMP/MTs). Kata Dayah

⁵ Ibid., 781.

⁶ Abdul Wahid, Kontribusi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PTI. Al-Hilal Sigli, “Meningkatkan Mutu Pendidikan di Aceh,” *Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam* Vol. 5, No. 1. Juli 2010, STIT PTI. Al-Hilal Sigli Jl. Lingkar Keunire Kec. Pidie Kab. Pidie, Telp. 0653-23467”, 28-29.

sendiri berasal dari kata Zawiyah (sudut atau ruangan di pojok-pojok masjid). Tidak cukup berhenti pada lembaga Meunasah dan Dayah, putera puteri Aceh juga bisa melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat menengah atas yang dikenal dengan sebutan “Rangkang” (setara SMA/MA/SMK).⁷ Rangkang merupakan evolusi dari sistem pendidikan klasik “masjid” yang pada masa itu digunakan sebagai pusat pembelajaran, masjid bagaimana pun juga harus kembali pada fungsi awalnya sebagai tempat ibadah yang membutuhkan ketenangan, bangunan yang berdiri bertebaran di sekitar masjid itulah yang kita disebut dengan “Rangkang”.

Meunasah, Dayah dan Rangkang dalam masa perjalanannya tumbuh seiring perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Aceh yang memiliki peran strategis dalam pembentukan kebudayaan Islam di wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Kehadiran lembaga-lembaga klasik Islam tersebut di atas terus mengalami perluasan secara fungsional, pergeseran sistem karena tuntutan perkembangan zaman, pun juga tuntutan sosial kehidupan masyarakat yang saat ini tidak lagi membutuhkan pemecahan problematika kehidupan melalui ilmu-ilmu agama semata, namun juga integrasi antara agama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, Makalah ini secara khusus membatasi kajiannya pada pembahasan: “Sejarah Sosial Pendidikan Islam Meunasah dan Dayah” beserta aspek-aspek lain yang mungkin mempengaruhinya.

Perkembangan Kelembagaan Pendidikan Meunasah dan Dayah di Aceh

Meunasah-Dayah, Masjid dan Rangkang tumbuh seiring perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Aceh yang memiliki peran strategis dalam pembentukan kebudayaan Islam di wilayah tersebut. Di penghujung abad ke-15, kerajaan-kerajaan Islam lokal yang dapat diidentifikasi melalui catatan sejarah diantaranya adalah: Kerajaan Peureulak, Tamiang (Aceh Timur), Samudera Pasei (Aceh Utara),⁸

⁷ Abuddin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya* (Jakarta: Rajagrafindo, 2012), 292-293.

⁸ Azyumardi Azra mengatakan ada sebuah historiografi dari Aceh memberikan informasi bahwa nenek moyang sultan Aceh adalah seorang Arab bernama Syeikh

Lingga (Aceh Tengah), Kerajaan Pidie (Aceh Pidie), Kerajaan Lamuri (Aceh Besar), dan Kerajaan Daya (Lamno, Pantai Barat).⁹ Pembentukan kebudayaan oleh para raja Aceh turut mempengaruhi dinamika perkembangan sosial pendidikan Islam di masing-masing daerah kekuasaan raja-raja tersebut. Para raja yang memerintah dengan “*Policy of Authority*” mereka turut mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Meunasah-Dayah, Masjid dan Rangkang, berevolusi menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam yang dikenal dengan nama Dayah Teungku Chiek (Dayah yang dipimpin seorang ulama besar).¹⁰

Untuk menguatkan pendapat di atas, Teungku Iskandar juga berpandangan bahwasanya sepanjang sejarah Kerajaan Melayu Klasik hingga masa kemerdekaan, Islam telah menjadi pondasi utama yang berperan serta membawa perubahan pada ruang sosial masyarakat Muslim Melayu. Islam telah membumi ke dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu Klasik, sejak Kerajaan Aceh, Lamri, Negeri Bihar (Biheue), Pedir, Negeri Acilabu, Lide, Pirada, Patee (9 M) hingga kerajaan-kerajaan setelahnya; Kerajaan Negeri Kedah (1136 M), Pahang, Aru, Johor, Nias, Minangkabau, Pasai (13 M), Perlak (13 M), dan Kerajaan Aceh Darussalam yang berdiri 1516 sebagai hasil penyatuan dari dua kerajaan besar yaitu Kerajaan Mahkota Kamal dan Kerajaan Darul Kamal.¹¹ Tidak hanya itu, kerajaan Islam Melayu juga

Jamal al-'Alam, yang dikirim Sultan 'Utsmani untuk mengislamkan penduduk Aceh. Pendapat lain mengatakan Islam diperkenalkan ke kawasan Aceh oleh seorang Arab bernama Syeikh 'Abd Allah 'Arif sekitar 506 H/1111 M. Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), 29-30. Sedangkan di Abad ke-16 dan 17 di Nusantara terdapat 4 (empat) pusat kekuasaan kerajaan Islam yang besar, yakni Pasai-Aceh (13-17 M), Demak-Mataram-Banten (16-18 M), Bugis-Makasar (15-17 M), dan Ternate-Tidore (15-17 M). Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), 243.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*, 14.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Teungku Iskandar, “Aceh Dalam Lintasan Sejarah: Suatu Tinjauan Kebudayaan” dalam *Prasaran Pada Seminar Kebudayaan dalam Rangka PKA-II dan Dies Natalis Ke-XI Universitas Sjah Kuala 21 s/d 25 Agustus 1972 di Banda Atjeh, Panitia Pusat Pekan Kebudayaan Atjeh Ke-II (the 2nd. Atjeh Cultural Festival)*, 1-4. Di dalam makalah ini

menjalin hubungan bilateral dengan kerajaan Turki ‘Uthmâni dan Kerajaan Mamalik Mesir. Salah satu contoh perwujudan hubungan bilateral ini diwujudkan dalam bentuk permintaan Sultan Alauddin Riayat Syah al-Katar (1539-1571) kepada Sultan Turki berupa bantuan armada perang pada tahun 1564 untuk membantu Aceh mengusir tentara Portugis di Malaka.¹² Ini membuktikan bahwa kerajaan-kerajaan Melayu baik di Malaka (Malaysia) sekarang maupun di Aceh (Nangroe Aceh Darussalam) memiliki jaringan arkeologi sejarah kebudayaan dan peradaban yang terbentuk berdasarkan motivasi agama dan menjadikan tradisi Melayu sebagai identitas pemersatu mereka.

Pada abad ke-17 merupakan puncak kemajuan kebudayaan Islam dalam arti yang sesungguhnya, khususnya pada masa Kerajaan Aceh Darussalam diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), Sultan Iskandar Thani (1636-1641) dan Sultanah Syafiatuddin (1641-1675). Pada masa itu pusat-pusat pengembangan kebudayaan Islam tersebar di seluruh kerajaan, seperti Meunasah pada tingkat “Gampong/kampung” (wilayah terkecil yang diperintah oleh seorang Keuchiek), Mesjid dan Dayah pada tingkat Mukim (gabungan beberapa “gampong” diperintah oleh Imum Mukim), Nanggro (gabungan beberapa mukim diperintah oleh seorang “Ulëebalang”),¹³ Sagi (gabungan beberapa nanggro diperintah oleh Panglima Sagi) dan terutama sekali di ibu kota kerajaan Bandar Aceh Darussalam. Pada masa itu juga para ulama dan pujangga, selain yang berasal dari daerah Aceh, juga banyak yang datang dari luar dan bertempat tinggal di sana, seperti Hamzah Fansuri, Syiah Kuala, Nuruddin Al-Raniry, Muhammad Azhari dan masih banyak lagi.¹⁴

juga dituliskan perjumpaan Sultan Samudra Pasai Malikul Zahir dengan Ibnu Batutah (1304-1377 M) seorang penjelajah dunia dari Maroko sebelum Christopher Columbus, Vasco de Gama dan Magellan.

¹² Ibid., 4.

¹³ Berkaitan dengan Meunasah di Aceh, bisa ditelusuri melalui “Hikayat Pocut Muhammad” yang termasuk Karya Sastra Aceh yang terkenal. Dalam hikayat tersebut diceritakan bahwa Meunasah memang tidak jauh berbeda dengan lembaga pendidikan Islam pesantren di Jawa. Badri Yatim, dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah* (Jakarta: Depag RI, 2000), 105-106.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*, 3. Selain Hamzah Fansuri, Syiah Kuala, Nuruddin Ar-Raniry, dan Muhammad Azhari, tokoh ulama dominan di Aceh pada abad ke-17 yaitu Ahmad al-Qushashi,

Warisan perjalanan sosial masyarakat Melayu sebagaimana dijelaskan di atas diwujudkan dalam bentuk pelembagaan pendidikan Islam Dayah, Meunasah dan Rangkang, yang dijadikan basis pembelajaran ilmu-ilmu agama, peribadatan, pertemuan-pertemuan urusan sosial kemasyarakatan hingga penginapan bagi para pemuda di wilayah tersebut. Pada awal terbentuknya sejarah sosial pendidikan masyarakat Islam di Aceh, dikenal tiga jenis lembaga pendidikan dasar bagi putera puteri masyarakat Aceh yaitu “Romoh, Meunasah dan Dayah”. “Romoh” yang dalam Bahasa Indonesia disebut juga rumah, tempat pemukiman penduduk bagi keluarga-keluarga Islam di “gampong-gampong (kampung-kampung)” sekitar kota pelabuhan. Di romoh para orangtua mengajarkan anak-anak mereka dasar-dasar keyakinan (akidah), ibadah dan muamalah. Sedangkan Meunasah sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu Madrasah, masyarakat Aceh menyebutnya Meulasah, Beunasah, Beulasah, manasah dan balai. Meunasah berfungsi sebagai tempat musyawarah, tempat shalat berjamaah, lembaga pendidikan bagi anak laki-laki dan pemuda di daerah Aceh. Dayah sendiri memiliki fungsi yang sama dengan Meunasah yang dikhususnya digunakan oleh anak-anak perempuan dan pemuda di sana.¹⁵

Seiring bertambahnya jumlah umat Islam di Aceh, “gampong-gampong atau kampung-kampung” yang telah terbentuk dalam komunitas Muslim yang domisili tempat tinggalnya berdekatan, didirikanlah Rangkang yaitu Masjid, mulanya digunakan sebagai tempat ibadah shalat Jumat, selanjutnya fungsinya mengalami perluasan sebagai lembaga pendidikan Islam. Rangkang dalam fungsinya sebagai institusi pendidikan Islam diajarkan pendalaman kajian ilmu-ilmu Islam sebagai kelanjutan dari sistem pendidikan sebelumnya; Romoh, Meunasah maupun Dayah, di Rangkang inilah para pemuda Aceh

Ibrahim al-Kurani, Syeikh Abdul al-Ra’uf al-Sinkili. Azyumardi Azra, *Renaissans Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 121-136. Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, 166-210.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh* (Jakarta: Depdikbud, 1984), 13.

banyak belajar secara luas dan mendalam tentang kajian Fiqh.¹⁶ Dikemudian hari rangkang disebut sebagai cikal bakal lembaga pendidikan Islam tingkat menengah yang pernah lahir di Aceh.

Asal kata Dayah sendiri dalam bahasa Arab disebut Zawiyah, didirikan dan dipimpin ulama yang dipercaya oleh raja. Dibeberapa Muenasah juga terdapat makam para raja Aceh.¹⁷ Berikut nama-nama Dayah¹⁸ dan pimpinan Dayah di kerajaan-kerajaan tersebut:

Tabel 1:

Lembaga Pendidikan Islam Dayah, Kerajaan pendiri dan Pengasuhnya Masa Klasik

No	Nama Dayah	Kerajaan	Pengasuh Dayah
1	Cot Kala	Peureulak	Teungku Chiek Muhammad Amin
2	Seuruleu	Lingga	Syekh Sirajuddin
3	Blang Peuria	Samudra Pasei	Teungku Chik Blang Peuria (Teungku Ja'kob)
4	Batu Karang	Tamiyang	Teungku Ampon Tuan
5	Lam Keuneu'eun	Lamura	Teungku Syekh Abdullah Kan'an

Diantara ke-lima (5) institusi Dayah di atas, sepertinya Dayah Cot Kala Kerajaan Peureulak didaulat sebagai Dayah tertua di Aceh bahkan Asia Tenggara, keterangan ini berdasarkan kesimpulan hasil seminar yang berjudul: *"Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara"*, diadakan di Rantau Kuala Simpang, 25-30 September 1980. Hasil kesimpulan seminar itu bersumber dari keterangan yang diperoleh berdasarkan lembaran-lembaran lepas dari naskah kuno *"Idzhâr al-Haq fi Mamlakah Peureulak"* karya Syeikh Ishak Makarani al-Pasi dan naskah tua *"Tazjirat Tabaqah Jam'u Salatîn"*. Meskipun disinyalir Kerajaan Peureulak merupakan kerajaan tertua yang didirikan

¹⁶ Ibid., 13-14.

¹⁷ Suprayitno, "Evidence of the Beginning of Islam in Sumatera: Study on the Acehnese Tombstone" dalam *Tawarikh: International Journal for Historical Studies*, 2(2) 201, 130, 135, 136.

¹⁸ Ibid.

pada tahun 225 H (840 M),¹⁹ raja pertama Peureulak Sultan Alaidin Saiyid Maulana Abdul Aziz Syah.²⁰

Menurut Drewes G.W.J sebagaimana diungkapkan Ahmad Ibrahim bahwa bentuk pemerintahan daerah atau wilayah (territorial) yang terkecil dari susunan pemerintahan Kerajaan-kerajaan Aceh adalah “Gampong atau Kampung”, setiap “Gapong” dikepalai oleh seorang “Keucik” dan Waki (wakil Keucik). “Gampong-gampong” tersebut letaknya berdekatan antar satu Gapong dengan “Gapong” lainnya. Penduduk Gapong melaksanakan ibadah Shalat Jum’at berjama’ah di Masjid (Rangkang). Masjid atau Rangkang sendiri terdapat di setiap mukim yang diasuh oleh pimpinan mukim disebut Imeum Mukim (Imam Mukim),²¹ masa sekarang di sebut Ta’mir Masjid.

Pada abad ke 18-19 sejumlah Dayah telah bermunculan di berbagai wilayah di Aceh, sejumlah Dayah yang diperkirakan didirikan dan berkembang pada masa ini²² adalah sebagai berikut:

¹⁹ Jika keterangan ini benar adanya, maka Kerajaan Peureulak di Aceh satu masa dengan Kerajaan Islam di Spanyol (Andalusia), tepatnya masa Kesultahan Abdur Rahman Al-Ausat (822-852 M). Pasca wafatnya Abdurrahman al-Ausat pada tahun 952 M., kekuasaannya diganti oleh anaknya Muhammad ibn Abdurrahman yang memerintah antara tahun 852-886 M. T}âriq al-Suwaitan, *al-Andalus al-Târikh al-Mus}awar Cetakan I* (Kuwait: Shirkah Ibda’ al-Fikr, 2005), 134-144.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*, 15.

²¹ Ahmad Ibrahim, et. Al., Reading on Islam in Southeast Asia *dalam* Drewes G.W.J “*New Light on The Coming of Islam to Indonesia*” (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 1985), 75.

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*, 18.

Tabel 2:
Lembaga Pendidikan Islam Dayah, Kerajaan Pendiri dan Pengasuhnya pada Abad 18-19

No	Nama Dayah	Kerajaan/Pendiri/Penggagas	Pengasuh	Wilayah
1	Teungku Chiek Tanoh Abee ²³	Sultan Muhammad Syah (1824-1836 M), Sultan Mahmud Syah (1870-1874 M), Muhammad Daud Syah (1874-1908 M) Kerajaan Aceh Darussalam	Syeikh Idrus Bayan dari Baghdad/Teungku Chiek Tanoh Abee	Seulimeum Aceh Besar
2	Teungku Chiek Kuta Karang (Dayah Ulee Susu)	Sultan Ibrahim Mansyur Shah (1857-1870 M)	Syekh Abbas Ibnu Muhammad/Teungku Chiek Kuta Karang (Dayah Ulee Susu)	
3	Lam Birah	Sultan Johan Syah (1735-1960 M), Sultan Mahmud Syah/Tuanku Raja (1760-1781 M)	Ja Meuntroe/Teungku Chiek Lam Birah, pada Abad 19	

²³ Di perpustakaan Dayah Tanoh Abee Seulimum, Aceh Besar, hingga saat ini masih menyimpan beribu-ribu naskah kitab lama berbahasa Arab Melayu. Diantaranya naskah Hikayat Prang Sabi (Hikayat Perang Sabil). Para ilmuwan Belanda yang dipelopori Snouck Hurgronje berusaha mempelajari karya-karya berhuruf Arab Melayu milik orang Aceh guna mengetahui jalan “lurus” mengalahkan perlawanan orang Aceh sendiri (Snouck Hurgronje, 1985). Tidak kurang 600 naskah Jawi/Jawoe (Arab Melayu) telah dialihkan ke huruf Latin saat itu. (Tempo, 23-39 Juli 2006: 70). Tengku Abdullah Sakti, “Perkembangan & Pelestarian Manuskrip Arab Melayu di Aceh” dalam *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. XVI, No. 2 Agustus 2011: 19-30, 23.

			dipimpin oleh Teungku Chiek Cot Keupeung dan Teungku Chiek Lam Baro	
4	Lam Nyong	-	-	
5	Lam Bhuk	-	-	
6	Krueng Kalee	-	-	
7	Lam Krak		Datu Muhammad	
8	Lam Pucok	Sultan Sulaiman Syah (1836-1857 M)	Teungku Muhammad Sa'ad (Teungku Chiek Lam Pucok)	
9	Lam U	Sultan Mahmud Syah (1870-1874 M)	Teungku Abdussalam (Teungku Chiek Lam Nyong) dan Teungku Syekh Umar (Teungku Chiek Di Lam U)	
10	Rumpet	Poteumeureuhom Daya: Raja Lamho Daya	Teungku Muhammad Yusuf	Kuala Daya, pantai

			(Teungku Chiek Di Rum- pet).	barat Aceh
11	Teungku Chiek Ditiro ²⁴	Mencapai kemajuan pesat di masa Teungku Chiek Di Tiro Muhammad Saman (1836-1891)	Teungku Chiek Ditiro, Teungku Chiek Di Tiro Muhammad Saman.	Aceh Pidie, daerah IX Mukim Keumangan
12	Teungku Chiek Tante Geulima	Sultan Muhammad Syah (1870-1874 M)	Teungku Chiek Pantee Ya'cob	
13	Meunasa h Biang	-	-	Kuta Batee Iliék Samalanga Aceh Utara
14	Cot Meurak	-	-	Kuta Pertahanan Batee Iliék Aceh Utara
15	Pulo Baroh	-	-	

Masih menurut Drewes G.W.J sebagaimana diungkapkan Ahmad Ibrahim mengenai jenjang pendidikan yang ada di Kerajaan Aceh Darussalam diawali pendidikan terendah Meunasah (Madrasah) yang terdapat di setiap “gampong atau kampung” dan mempunyai beragam kegunaan atau fungsi antara lain: (1) sebagai tempat belajar Al-Qur’an, (2) sebagai Sekolah Dasar, dengan materi yang diajarkan yaitu menulis dan membaca huruf Arab, Ilmu agama, bahasa Melayu, akhlak dan sejarah Islam. Adapun Fungsi lainnya adalah sebagai berikut: (1) sebagai tempat ibadah shalat 5 (lima) waktu di kampung itu, (2) sebagai tempat

²⁴ Dayah Teungku Chiek Ditiro ini terdiri dari 2 (dua) Dayah yaitu (1) Dayah Tiro Keumangan, dipimpin oleh Teungku Dhiék Muhammad Amin (Teungku Chiek Dayah Cut, Guru Muhammad Saman) dan (2) Dayah Tiro Cumbok dipimpin oleh Teungku Chiek Übet (paman Muhammad Saman). Ibid.

shalat tarawih dan tempat membaca Al-Qur'an di bulan puasa, (3) digunakan tempat kenduri atau tasyakuran ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan Maulud, (4) sebagai tempat menyerahkan zakat fitrah pada hari menjelang Idh al-Fitri ataupun bulan puasa, (5) sebagai tempat mengadakan perdamaian bila terjadi sengketa antara anggota kampung/kampung, (6) tempat bermusyawarah dalam segala urusan kemasyarakatan, (7) Meunasah digunakan untuk mengetahui arah kiblat shalat, inilah mengapa letak meunasah harus berbeda dengan letak rumah.²⁵

Dayah, Meunasah dan Masjid yang pada awal berdirinya selain dijadikan sebagai pusat pendidikan Islam Klasik di Aceh, juga memiliki peranan penting dalam pembelaan tanah air dari penjajahan Belanda. Salah satu Dayah yang digunakan sebagai benteng pertahanan adalah Dayah Batee Iliék,²⁶ hingga akhir abad ke-19 banyak Dayah yang terbengkalai atau langsung diserang oleh tentara Belanda karena dianggap sebagai basis konsentrasi kekuatan pejuang rakyat.²⁷

Berkaitan dengan Meunasah (Dayah), Mehmet Ozay menjelaskan salah satu sejarah lahirnya Dayah Tanah Abee atau Zawiyah (Meunasah) yang memiliki fungsi tunggal sebagai pusat pendidikan tinggi Islam. Mustafa al-Rumi, salah seorang murid dan pengganti dari Abdurrauf al-Singkili memberikan ijazah untuk mengajarkan praktek tarikat Shattariyah untuk anggota keluarga. Inilah yang kemudian melatarbelakangi didirikannya Dayah Tanoh Abee (DTA). Ayah Mustafa al-Rumi sendiri adalah berasal dari Turki.²⁸

Adapun Dayah berdasarkan keterangan Maburr merupakan lembaga tertua di Aceh yang mengikuti Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dengan tetap mempertahankan ciri khas lokal masyarakat Aceh. Dayah dengan sistem rangkang atau pondok ini

²⁵ Ahmad Ibrahim, et. Al., *Reading on Islam in Southeast Asia*, 76. Lihat juga dalam Dyah Kumalasari, *Diktat Sejarah Pendidikan II* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2009), 19.

²⁶ Tengku Abdullah Sakti, "Perkembangan & Pelestarian Manuskrip Arab Melayu di Aceh", 20.

²⁷ Ibid.

²⁸ Mehmet Ozay, A preliminary note on the Dayah Tanoh Abee, dalam "*Ottoman Connections to The Malay World*", 68.

dipimpin oleh ulama, diselenggarakan oleh yayasan, badan sosial, perorangan atau pemerintah. Sebagian dayah di Aceh masih mempertahankan sistem pendidikan lama, sebagian yang lain berevolusi mengikuti Sistem Pendidikan Nasional yang juga menggunakan landasan yuridis khusus tentang pendidikan di Aceh itu sendiri yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 dengan pendidikan yang bernuansa Islami yang dijabarkan dalam qanun-qanun (undang-undang). Adapun penyelenggaraan pendidikan juga di Aceh dituangkan dalam Qanun (undang-undang) Provinsi NAD Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dituangkan dalam Point 12, secara jelas dituliskan sebagai berikut: “Sistem Pendidikan Aceh adalah pendidikan yang diselenggarakan di Provinsi Aceh berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya daerah serta tidak bertentangan dengan syari’at Islam.”²⁹

Berdasarkan Qanun Provinsi NAD Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dijelaskan tentang dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan di Aceh pasal 2-5, diuraikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Aceh berdasarkan pada al-Qur’ân dan al-Hadîth, falsafah Negara Indonesia Pancasila, UUD 1945, dan kebudayaan Aceh.
2. Pendidikan Aceh berfungsi untuk memantapkan iman dan takwa kepada Allah SWT, mengembangkan kemampuan, ilmu, dan amal saleh, dalam meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntutan ajaran Islam, dan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
3. Pendidikan Aceh bertujuan untuk membina pribadi Muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakh al-Karimah, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak azasi manusia, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, mampu

²⁹ Mabrur, “Protret Pendidikan di Aceh dalam Lintasan Sejarah”, dalam *“Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam* Vol. 5, No. 1. Juli 2010, STIT PTI. Al-Hilal Sigli Jl. Lingkar Keunire Kec. Pidie Kab. Pidie, Telp. 0653-23467”, 44-52.

menghadapi berbagai tantangan global, dan memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, masyarakat, dan negara.

4. Pendidikan di Aceh dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat, (b) pendidikan dilaksanakan secara Islami, demokratis, adil, dan memperhatikan hak-hak azasi manusia, dan (c) pendidikan dilaksanakan secara menyeluruh terpadu, terbuka, dan terarah pada pengembangan diri peserta didik semaksimal mungkin sesuai minat, bakat, dan kemampuannya.³⁰

Keterkaitan antara pendidikan dan keislaman dikuatkan legalitasnya dengan kehadiran landasan yuridis yang dibentuk oleh pemerintah pusat sebagai suatu kekuatan yang sangat mendukung terselenggaranya pendidikan di Aceh. Landasan yuridis tersebut dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Provdista) dalam pasal 3 ayat (2) mengatur penyelenggaraan keistimewaan Aceh meliputi: (a) Penyelenggaraan kehidupan beragama, (b) Penyelenggaraan kehidupan adat, (c) Penyelenggaraan pendidikan, dan (d) Peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.³¹

Sejak saat itu muncullah variatif (walau ada keinginan membuat satu atap) dalam pendidikan di Aceh hingga sekarang, yaitu:

1. Lembaga-lembaga pendidikan/sekolah dari jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).
2. Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK), dan jenjang Pendidikan Tinggi (Universitas), baik negeri maupun swasta.
3. Lembaga-lembaga pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (MI dan MTs).
4. Jenjang Pendidikan Menengah (MA/MAK), dan Jenjang Pendidikan Tinggi (Universitas, IAIN/STAIN/STIS)

³⁰ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan Pendidikan, 4-5.

³¹ Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1-3.

5. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, (Meunasah, Rangkang, Dayah, dan Pesantren).
6. Lembaga-lembaga pendidikan non formal dalam bentuk majlis taklim sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 34.³²

Pasca perlawanan rakyat Aceh secara gerilya dalam melawan penjajah berhenti, Teungku Chiek bersama-sama penduduk Aceh membangun kembali Dayah-dayah dan Rangkang yang selama masa perjuangan tersebut ditinggalkan. Sejak itulah, tepatnya setelah tahun 1904 penyebutan istilah Dayah atau Rangkang mulai memudar, digantikan dengan istilah Pesantren termasuk di daerah Aceh Barat dan Selatan sendiri, penyebutan istilah “Pesantren” ini lebih populis dibandingkan dengan Dayah dan Rangkang.³³ Meskipun demikian pendidikan Islam antara satu lembaga di suatu wilayah dengan lembaga pendidikan di wilayah lain, terdapat banyak kesamaan. Seringkali perbedaannya hanya terletak pada persoalan nama yang berbeda itu, lebih disebabkan karena lembaga pendidikan Islam merupakan kelanjutan dari suatu pranata sosial yang hidup dan berkembang di wilayah yang bersangkutan.³⁴ Dengan demikian sistem lembaga pendidikan Islam Meunasah, Dayah dan Rangkang Aceh dapat dianalogikan dengan sistem Pesantren di Jawa.

Berikut kami paparkan Dayah atau Pesantren yang didirikan atau dibangun kembali pada pertengahan pertama abad ke-20 berikut ini:

Tabel 3:

Lembaga Pendidikan Islam Dayah, Nama Pesantren, dan Pendiri/Penerusnya pada Abad 20

No	Nama Dayah/ Nama Pesantren	Wilayah	Pendiri/Penerus
1	Tanoh Abee dan Lam Birah	Aceh Besar	Teungku H. Abbas (Teungku Chiek Lam Bi rah)

³² Mabruur, Protret Pendidikan di Aceh dalam Lintasan Sejarah, 44-52.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*, 20-22.

³⁴ Badri Yatim, dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, 105.

2	Jeureula		Teungku H. Jakfar (Teungku Chiek Lam Jabad)
3	Lam Nyong, Lam U, Lam Bhuk, Ulee Susu, dan Indrapuri		Teungku Chiek Indrapuri
4	Lam Seunong		Teungku Chiek Lam Seunong
5	Ulee U		Teungku Chiek Ulee U
6	Krueng Kalee		
7	Montasik		
8	Lam Sie		
9	Lam Diran, mengajarkan santri wanita ilmu agama, dan berbagai jenis ketrampilan, seperti menjahit, menyulam dan lain-lain		Teungku Fakinah, pada tahun 1910 melanjutkan Dayah milik neneknya di Lam Krak dan di Lam Pucok ³⁵
10	Tiro, Pantee Geulima, Cot Plieng, Biang, Dayah Leupoh Raya, Garot/Gampong Aree, le Leubeu	Aceh Pidie	Teungku Muhammad Arsyad (Teungku Chiek Di Yan)
11	Meunasah Raya		Teungku Muhammad Yusuf (Teungku Chiek Geulumpang Minyeuk)

³⁵ Peran wanita sebagai pemimpin atau pengasuh Dayah, disebut juga Teungku Inong. Perjuangan Teungku Fakinah (1856-1938 M) dapat kita baca dalam tulisan Asna Husin, "Leadership and Authority Women Leading Dayah in Aceh" dalam *Gender and Power in Indonesia Islam: Leaders, Feminist, and Pesantren Selves*, Edited by Bianca J. Smith and Mark Woodward (Routledge), 49-64.

12	Teupin Raya		Teungku Chiek Teupin Raya
13	Tanjungan, Mesjid Raya, Kuala Biang, Biang Bladeh, Cot Meurak, Juli, dan Pulo Kiton	Aceh Utara	Teungku Chiek Pulo Kiton
14	Rumpet	Aceh Barat	keturunan Teungku Chiek Muhammad Yusuf
15	Pesantren di Ujung Kalak dan Biang Meulaboh; di Paya Lumpai Samatiga		Teungku Syekh Abu Bakar (sampai tahun 1936)
16	Pesantren di Kuala Bhee Woyla		Teungku Ahmad
17	Pesantren di Peureumeu		Teungku Di Tuwi
18	Teungku Syekh Mud, sekarang berganti nama Pesantren Bustanul Huda	Biang Pidie Aceh Selatan	
19	Pesantren Islahul Umam	Suak Samadua Aceh Selatan	Teungku Abu dan Teungku M. Yasin
20	Pesantren Al-Muslim, sekarang diubah menjadi sistem madrasah	Terbangan Aceh Selatan	Teungku H. M
21	Pesantren Al-Khairiyah, sekarang diubah menjadi sistem madrasah	Tapaktuan Aceh Selatan	Teungku Zamzami Yahya
22	Pesantren Al-Khairiyah, sekarang	Labuhan Haji Aceh Selatan	Teungku Mohammad Ali

	diubah menjadi sistem madrasah		Lampisang.
23	<p>Pesantren Darussalam, menggunakan jalur pendidikan tradisional seperti pada dayah/pasantren lainnya dan jalur pendidikan madrasah (sekolah), yaitu melalui tahap-tahap atau kelas secara klasikal. Jenjang pendidikan terdiri dari tiga tingkatan, yaitu: (1) tingkat Subiah (pendahuluan, 3 tahun); (2), tingkat Ibtidaiyah (dasar, 7 tahun); dan (3), tingkat Bustanul Muhaqqiqin (Advanced, 3 tahun). Sejak tahun 1968, jenjang tersebut mengalami perubahan, yaitu: tingkat Ibtidaiyah (4 tahun), Tsanawiyah (3 tahun), Aliyah (3 tahun) dan Bustanul Muhaqqiqin (3 tahun).</p>	Labuhan Haji Aceh Selatan	

Perkembangan pendidikan Islam Meunasah-Dayah dan Rangkang muncul sebagai bentuk institusionalisasi tradisi pembelajaran dalam

Islam, memiliki fungsi sebagai tempat dan pusat berlangsungnya pembelajaran dalam masyarakat Muslim Aceh. Selain berfungsi sebagai pusat pembelajaran, Meunasah-Dayah dan Rangkang juga digunakan sebagai pusat sosial kemasyarakatan, misalnya seperti jual beli sama halnya dengan fungsi sosial kemasyarakatan Surau di Minangkabau,³⁶ kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya yang terkait dengan peribadatan misalnya sebagai tempat beribadah secara berjamaah pada malam hari yang dipimpin oleh seorang teungku, melakukan ritual ibadah sunnah misalnya menyanyikan “*rateb Saman*” sesuai nama *aulia (sufi)* yang mengajarkan *rateb* tersebut dan “*litani*.”³⁷ Lembaga klasik ini secara tidak langsung menjadi simbol pemersatu masyarakat Aceh dalam rangka mencapai tujuan-tujuan mereka ke arah peradaban yang lebih baik, terlepas dari polemik sejarah Aceh yang selalu dirundung konflik berkepanjangan, bahkan tidak terlalu berlebihan jika Safwan Idris mengatakan bahwa pendidikan di Aceh merupakan warisan konflik³⁸ yang sedang mencari bentuk (tipologi) idealnya.³⁹ Perubahan sistem pendidikan dalam institusi ini tentu saja dilakukan sebagai upaya adaptasi terhadap perkembangan zaman yang tantangannya semakin kompleks.

Perkembangan Sosial Pendidikan Islam Meunasah dan Dayah di Aceh

Meunasah

Sebagaimana penjelasan di atas, diungkapkan bahwa Meunasah adalah bangunan permanen yang terdapat di setiap “gapong (kampong atau desa)”. Bangunan ini difungsikan sebagai tempat belajar dan berdiskusi serta membahas masalah-masalah kemasyarakatan. Menurut Sabirin dalam Jurnal Ilmiah Peuradeun, secara fisik, Meunasah merupakan sebuah

³⁶ Badri Yatim, dkk, *Sejarah Perkembangan Madrasah*, 107.

³⁷ Ibid.,

³⁸ Bob Sugeng Hadiwinata dkk, secara khusus menulis sejarah panjang konflik di Aceh dalam buku: “Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: dari Kotak Peluru ke Kotak Suara”. ³⁸ Bob Sugeng Hadiwinata dkk, *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: dari Kotak Peluru ke Kotak Suara* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2010).

³⁹ Pernyataan Safwan Idris ini sebagaimana dikutip oleh Al-Musanna, “Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal” dalam *Konteks Pendidikan di Aceh dalam Jurnal Penelitian* Vol. 10 No. 2 Oktober 2009, 6.

bangunan yang letaknya di tengah-tengah “gampong/kampung” atau tempat strategis yang mudah dijangkau oleh komunitas “gampong”. Bangunan Meunasah umumnya menyerupai konstruksi rumah tradisional Aceh, namun tidak dilengkapi dengan lorong (ruangan), sekatan-sekatan, dan di bagian dalamnya terdapat ruangan besar yang terbuka. Bangunan ini terbuat dari kayu, dipenuhi dengan berbagai ukiran bercorak omamen Aceh dan Timur Tengah. Meunasah dibangun dengan tiang-tiang kayu dan agak tinggi, yang bagian bawahnya bisa digunakan sebagai tempat bermain anak. Sementara itu, pada bagian depannya dilengkapi dengan beranda dengan ketinggian agak rendah yang sering dipakai sebagai tempat istirahat orang-orang yang datang ke Meunasah, letaknya secara umum menghadap ke arah Barat yang menandakan arah kiblat untuk melaksanakan shalat. Bentuk ini perlu dipertahankan, agar ciri khas ke-Aceh-an tetap terpelihara dan lebih mudah mengetahui arah kiblat dengan melihat bangunan Meunasah.⁴⁰

Masih menurut Sabirin, Ia mengajak pentingnya untuk memahami kearifan lokal masyarakat setempat yang menjadi ruh budaya masyarakat Aceh, karena akan sangat menentukan terhadap berhasil tidaknya proses pemberdayaan dan pembangunan terhadap masyarakat. Dalam upaya membangun Aceh dengan memanfaatkan Meunasah hendaknya juga tetap memperhatikan aspek kemajuan zaman dengan tetap menjaga substansi dari kebudayaan Aceh itu sendiri, sehingga tidak kering dari nilai-nilai budaya yang ada.⁴¹

Fungsi Meunasah lainnya adalah sebagai tempat bermalam bagi anak laki-laki maupun pemuda dewasa yang belum menikah. Meunasah juga digunakan sebagai tempat peribadatan masyarakat sekitar.⁴² Menurut Abasri dalam Samsul Nizar: *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia* dijelaskan 2 (dua) fungsi Meunasah, yaitu: (1) Meunasah sebagai tempat upacara keagamaan, penerimaan zakat atau tempat

⁴⁰ Sabirin, “Meunasah dan Ketahanan Masyarakat Gampong (Kajian Kritis terhadap *Power of Local Wisdom*)” dalam *Jurnal Ilmiah Peuradeun (JIP-International Multidisciplinary Journal)* Vol. II, No. 02, Mei 2014, ISSN: 2338-8617, 108, 114-115.

⁴¹ Ibid.

⁴² Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 284-285.

penyalurannya, tempat penyelesaian perkara agama, musyawarah dan menerima tamu. Adapun fungsi Meunasah yang kedua (2), Meunasah sebagai tempat pendidikan Islam di mana diajarkan pelajaran membaca al-Qur'ân. Penggajian bagi orang dewasa diadakan pada malam hari tertentu dengan metode ceramah satu bulan sekali. Kemudian, pada hari Jum'at dipakai ibu-ibu untuk shalat berjamaah dzuhur yang diteruskan penggajian yang dipimpin oleh seorang guru perempuan. Selain berperan sebagai tempat pendidikan agama, Meunasah juga digunakan sebagai tempat jual beli. Pengasuh atau pemimpin Meunasah disebut juga dengan Teungku sedangkan sebutan Teungku Inong digunakan untuk panggilan Teungku perempuan.⁴³

Lebih lanjut, di Meunasah para siswa juga diajarkan ilmu-ilmu dasar ajaran Islam, seperti Fikih, Tauhid, Akhlak, Sejarah Nabi Muhammad SAW⁴⁴. Menempuh pendidikan di Meunasah umumnya berkisar antara dua (2) tahun hingga sepuluh (10) tahun. Adapun jam pembelajarannya dilakukan pada malam hari. Buku-buku yang digunakan adalah buku-buku berbahasa Melayu seperti kitab perukunan dan Risalah Masâil al-Muhtadîn. Belajar di Meunasah pun tidak dipunggut bayaran, para Teungku maupun Teungku Inong tidak digaji, mereka memiliki keyakinan mengajar ilmu-ilmu agama sebagai bagian dari mengamalkan ilmu sehingga dianggap sebagai bagian dari ibadah, namun biasanya para Teungku mendapatkan hadiah dari para murid-muridnya pasca menuntaskan salah satu dari pelajaran yang diterimanya.⁴⁵

Dayah

Dayah merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan Meunasah. Di sini mereka dituntut untuk memahami ilmu-ilmu agama banyak lagi sebab seluruh muatan bidang studinya adalah ilmu-ilmu agama. Di masa kini, Dayah telah memodernisasikan dirinya pada pengembangan kurikulumnya, selain itu dilakukan perubahan fundamental pada pelaksanaan kurikulum tersebut di tingkat kelas dalam bentuk

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Abuddin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya*, 292.

⁴⁵ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*, 285.

perbaikan sistem pembelajaran, termasuk pengelolaan atau supervisi, baik supervisi administrasi di tingkat institusi maupun supervisi pembelajaran di sekolah.⁴⁶ Perubahan ini sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat sebagaimana diungkapkan dalam pendahuluan Makalah ini.

Mashuri dalam Jurnal Didaktika mengungkapkan tentang dinamika perubahan lembaga pendidikan Dayah dewasa ini sangat signifikan dengan cara mengadopsi sistem modern, disamping mempertahankan sistem klasik yang dipandang relevan, terutama dalam konteks perubahan bentuk fisik maupun non fisik. Dalam bentuk fisik, misalnya meliputi bentuk bangunan Dayah yang modern, adanya gedung perkantoran dan juga tersedianya fasilitas-fasilitas umum lainnya. Adapun perubahan dalam bentuk non fisik, seperti integrasi kurikulum baru ke dalam kurikulum Dayah, pengelolaan atau manajemen yang modern dalam bidang akademik dan keuangan. Perubahan selanjutnya adalah menyelenggarakan sekolah-sekolah umum melalui pengembangan kurikulumnya atau mendirikan institusi milik pemerintah ini sebagai kelanjutan pendidikan Dayah sehingga terjadi peningkatan *soft skill* (keterampilan pendukung kompetensi utama) bagi para alumni Dayah itu sendiri.⁴⁷ Terjadinya dinamika perubahan di Dayah dewasa ini semata-mata disebabkan oleh faktor tuntutan masyarakat terhadap kualitas alumni atau lulusan Dayah yang mampu berkiprah di dunia kerja yang semakin hari semakin membutuhkan beragam kompetensi. Selain itu, faktor arus modernisasi dan globalisasi yang menggurita juga menjadi pertimbangan utama para pimpinan Dayah untuk terbuka dan elastis mengorganisasikan pengelolaan lembaga ini.

Meunasah dan Dayah mungkinkah akan menjadi Cagar Budaya Aceh?

Ide melakukan modernisasi pendidikan Islam dalam pemikiran dan institusi Islam harus dilakukan dalam rangka menyelamatkan diri dari nestapa ketidakberdayaan umat Islam dalam berhadapan dan

⁴⁶ Abuddin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya*, 292.

⁴⁷ Mashuri, *Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Dayah* dalam "Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. XIII, No. 2, Februari 2013", 269.

menghadapi kemajuan dunia modern.⁴⁸ Nasib Meunasah dan Dayah hampir mirip dengan Surau di Sumatera Barat, istilah “krisis surau” menurut Azyumardi Azra menggambarkan kegelisahan lembaga-lembaga klasik lainnya termasuk Meunasah dan Dayah.⁴⁹ Surau dan konsep Pesantren dalam tulisan Azra dapat ditranformasikan ke dalam Meunasah-Dayah dan konsep Pesantren atau bahkan Madrasah, Sekolah Islam, Ma’had Ali, Sekolah Tinggi Agama Islam serta Universitas. Dayah dan Meunasah harus didukung untuk melakukan perubahan, menjadi lembaga pendidikan Islam strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia Muslim masa depan di Aceh. Dayah dan Meunasah diharapkan mampu menjadi institusi yang melahirkan lulusan/alumni unggul kompetitif dengan lulusan/alumni lembaga pendidikan sederajat, sehingga alumni atau lulusan mampu *survive* di tengah-tengah persaingan hidup di masyarakat sekembalinya dari bangku belajar; Meunasah-Dayah.

Sebagaimana Madrasah, Meunasah-Dayah merupakan lembaga pendidikan Islam warisan masa lalu. Memodernisasikan Meunasah-Dayah sebagai upaya menyelamatkan institusi Islam tua ini agar tidak menjadi “cagar budaya”, tentu bisa belajar dari pengalaman model-model modernisasi madrasah berdasarkan pengalaman Mesir (Masjid-Madrasah-Universitas Al-Azhar), pengalaman Turki (Maktab-Sekolah Remaja-Sekolah perempuan-Sekolah Imam-Khatib), dan pengalaman Saudi Arabia (Madrasah-Sekolah Hasyimiyah).⁵⁰

Catatan Akhir

Meunasah dan Dayah lahir dari bumi Indonesia yang merupakan warisan kebudayaan dan peradaban Islam Nusantara. Tugas kita adalah menjaga dan melestarikan warisan ini dengan cara memberikan kontribusi pemikiran “kreatif-inovatif” terhadap upaya pelestarian

⁴⁸ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 31.

⁴⁹ *Ibid.*, 117-148.

⁵⁰ Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) : 42-72. Lihat juga Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 81-154.

institusi klasik ini sebagai bagian dari “kearifan lokal”⁵¹ masyarakat Aceh. Usaha ini diharapkan mampu menjaga institusi Meunasah dan Dayah tetap dinamis dan eksis, bertahan terhadap benturan “budaya dan peradaban” manusia sepanjang zaman. Walhasil, berdasarkan uraian pembahasan Makalah Perkembangan Pendidikan Meunasah dan Dayah di Aceh ini, akhirnya dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Meunasah, Dayah dan Rangkang adalah warisan kebudayaan dan peradaban Indonesia (*indegenious*), institusi-institusi ini harus terus dibenahi terutama perbaikan internal dan eksternal. Perbaikan internal meliputi peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fungsi administrator dan leader dalam sebuah institusi pendidikan. Adapun perbaikan eksternal menyangkut masa depan institusi itu sendiri dalam menghadapi tantangan globalisasi, demokratisasi, dan liberalisasi. Tentunya langkah yang diambil adalah mempertegas visi, misi, sasaran dan tujuan pendidikan Islam yaitu agamis, populis, berkualitas dan beragam⁵².
2. Meunasah, Dayah dan Rangkang merupakan cikal bakal Pesantren dan Madrasah di Jawa, kontribusinya yang luar biasa terhadap pengembangan pendidikan di negara ini seharusnya dijadikan motivasi mengintegrasikan dan mengevolusi Meunasah, Dayah dan Rangkang menuju tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu Universitas, meskipun bentuk evolusi institusi ini sudah ada namun belum sepenuhnya menjadi bagian dari genealogi keilmuan dan legitimasi dari pemerintah secara utuh tiga (3) institusi di atas. Artinya tradisi Meunasah, Dayah dan Rangkang diantara realita dan harapan, seperti halnya Pesantren⁵³.

⁵¹ Berkaitan dengan kearifan lokal di Aceh khususnya, Rusjdi Ali Muhammad secara khusus menulis buku tentang Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Naggroe Aceh Darussalam, berisi tentang sosialisasi syari’ah Islam dan sekaligus memberikan gambaran format aplikasi Syari’at Islam yang praktis dan membumi. Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari’at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Naggroe Aceh Darussalam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu).

⁵² Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 13-23.

⁵³ Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), 251-268.

3. Meunasah, Dayah dan Rangkang memiliki 4 (empat) fungsi atau kegunaan utama bagi masyarakat Aceh, yaitu: (1) sebagai pusat pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan dan tempat peribadatan, (2) di masa lalu digunakan sebagai basis pertahanan para pejuang Aceh melawan penjajahan, (3) menjadi institusi yang turut berkontribusi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa khususnya putera puteri Aceh dan sekitarnya, dan (4) sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan.[]

Daftar Rujukan

- Al-Suwaidan, Târiq. *al-Andalus al-Târikh al-Muṣawar*, Cetakan I. Kuwait: Shirkah Ibdâ' al-Fikr, 2005.
- Al-Musanna. "Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal" *dalam Konteks Pendidikan di Aceh dalam Jurnal Penelitian* Vol. 10 No. 2 Oktober 2009.
- Ambary, Hasan Muarif. *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Arief, Subhan. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Asna, Husin. "Leadership and Authority Women Leading Dayah in Aceh" *dalam Gender and Power in Indonesia Islam: Leaders, Feminist, and Pesantren Selves*, Edited by Bianca J. Smith and Mark Woodward (Routledge).
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
- _____. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- _____. *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Bustamam, Kamaruzzaman dan Ahmad, Patrick Jory. *Islamic Studies and Islamic Education in Contemporary Southeast Asia*, Kuala Lumpur: Yayasan Ilmuwan, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Depdikbud, 1984.

- Dhofier, Zamakhsari. *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Hadiwinata dkk, Sugeng. *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka: dari Kotak Peluru ke Kotak Suara*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2010.
- Ibrahim, Ahmad. et. Al., Reading on Islam in Southeast Asia dalam *Drewes G.W.J "New Light on The Coming of Islam to Indonesia"*, Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 1985.
- Iskandar, Teungku. "Aceh Dalam Lintasan Sejarah: Suatu Tinjauan Kebudayaan" dalam *Prasaran Pada Seminar Kebudajaan dalam Rangka PKA-II dan Dies Natalis Ke-XI Universitas Sjah Kuala 21 s/d 25 Agustus 1972 di Banda Atjeh, Panitia Pusat Pekan Kebudajaan Atjeh Ke-II (the 2nd. Atjeh Cultural Festival)*.
- Kumalasari, Dyah. *Diktat Sejarah Pendidikan II*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2009.
- Mabrur. Protret Pendidikan di Aceh dalam Lintasan Sejarah, dalam *"Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam Vol. 5, No. 1. Juli 2010, STIT PTI. Al-Hilal Sigli Jl. Lingkar Keunire Kec. Pidie Kab. Pidie, Telp. 0653-23467*.
- Maksum. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Mashuri. Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Dayah dalam *"Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. XIII, No. 2, Februari 2013, Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh"*.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Naggroe Aceh Darussalam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya*. Jakarta: Rajagrafindo, 2012.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ozay, Mehmet. A preliminary note on the Dayah Tanoh Abee, dalam *"Ottoman Connections to The Malay World"*.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan Pendidikan.

- Rahim, Husni. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Sabirin. "Meunasah dan Ketahanan Masyarakat Gampong (Kajian Kritis terhadap *Power of Local Wisdom*)" dalam *Jurnal Ilmiah Peuradeun (JIP-International Multidisciplinary Journal)* Vol. II, No. 02, Mei 2014, ISSN: 2338-8617.
- Sakti, Tengku Abdullah. "Perkembangan & Pelestarian Manuskrip Arab Melayu di Aceh" dalam *Jurnal Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. XVI, No. 2 Agustus 2011.
- Sulaiman, Mashitah. "Islam dan Transformasi Sosial Masyarakat Melayu Malaysia: Suatu Kajian Eksploratori" dalam *Proceeding of the International Conference on Social Science Research, ICSSR 2013* (e-ISBN 978-967- 11768-1-8).4-5 June 2013, Penang, Malaysia. Organized by WorldConferences.net 778 Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, Malaysia.
- Suprayitno. "Evidence of the Beginning of Islam in Sumatera: Study on the Acehnese Tombstone" dalam *Tawarikh: International Journal for Historical Studies*, 2(2) 201.
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- Wahid, Abdul. Kontribusi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah PTI. Al-Hilal Sigli *dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh dalam dalam "Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam* Vol. 5, No. 1. Juli 2010, STIT PTI. Al-Hilal Sigli Jl. Lingkar Keunire Kec. Pidie Kab. Pidie, Telp. 0653-23467".
- Yatim, Badri dkk. *Sejarah Perkembangan Madrasah*. Jakarta: Depag RI, 2000.